

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
 Volume 6, Nomor 1, Juli 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Pengantar Redaksi.....	ii
Lembar Abstrak.....	iii- xxiv
Artikel:.....	
Analisis Hukum Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Es-10/L/22 Dalam Kasus Inisiasi Pemindahan Kantor Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Dari Tel Aviv ke Jerusalem Menurut Piagam PBB	
<i>Olsen Peranto</i>	1 - 22
Urgensi Pengaturan Migrasi Digitalisasi Penyiaran di Indonesia	
<i>R.Priharta Budiprasetya E.P.Y</i>	23- 44
Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi	
<i>Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto</i>	45- 69
Reformulasi Pengaturan Kewenangan Praperadilan Dalam Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka	
<i>Agus Priyono</i>	70- 86
Analisis Yuridis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Konstitusi	
<i>Nita Ariyulinda</i>	87- 103
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	
<i>Meirina Fajarwati</i>	104 - 128
Dampak Pemberian Hak Imunitas Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	
<i>Maharani Siti Shopia</i>	129 - 149
Analisis Yuridis Pemberian Insentif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
<i>Wiwin Sri Rahyani</i>	150 - 164
Pekerja Anak: Bagaimana Perlindungan Hukumnya?	
<i>Yanuar Putra Erwin</i>	165 - 183
Analisis Yuridis Kedudukan Likuidator Dalam Melikuidasi Perseroan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	
<i>Arifudin</i>	184 - 200
Telaah Kritis Terhadap Penjaminan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan Persinggungannya Dengan Sektor Usaha Perasuransian	
<i>Chairul Umam</i>	201 - 216

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 6 Nomor 1, Juli 2018. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 11 (sebelas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 11 (sebelas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Analisis Hukum Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Es-10/L/22 Dalam Kasus Inisiasi Pemindahan Kantor Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Dari Tel Aviv ke Jerusalem Menurut Piagam PBB. Kedua, Urgensi Pengaturan Migrasi Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Ketiga, Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat, Reformulasi Pengaturan Kewenangan Praperadilan Dalam Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka. Kelima, Analisis Yuridis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Konstitusi. Keenam, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Ketujuh, Dampak Pemberian Hak Imunitas Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kedelapan, Analisis Yuridis Pemberian Insentif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesembilan, Pekerja Anak: Bagaimana Perlindungan Hukumnya? Kesepuluh, Analisis Yuridis Kedudukan Likuidator Dalam Melikuidasi Perseroan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kesebelas, Telaah Kritis Terhadap Penjaminan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan Persinggungannya Dengan Sektor Usaha Perasuransian.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2018

Redaksi

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.w

Olsen Peranto

Badan Keahlian DPR RI

**Analisis Hukum Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Es-10/L/22
Dalam Kasus Inisiasi Pemindahan Kantor Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat
Dari Tel Aviv ke Jerusalem Menurut Piagam PBB**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No.1, Juli 2018, halaman 1 - 22

Dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Majelis Umum PBB dapat melakukan intervensi terhadap suatu pertikaian internasional ketika Dewan Keamanan gagal menjalankan fungsinya. Intervensi tersebut nampak sangat signifikan dalam beberapa penyelesaian konflik internasional. Majelis Umum mengeluarkan resolusi Nomor A/ES-10/L/22 dalam kasus inisiasi pemindahan kantor diplomatik AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Status Jerusalem menurut Resolusi PBB adalah "*corpus separatum*" yang artinya memiliki status khusus di bawah otorisasi PBB. Permasalahan yang akan dikaji adalah terkait pemindahan kantor diplomatik dari Tel Aviv ke Jerusalem oleh AS, Resolusi Majelis Umum terhadap tindakan AS tersebut, serta implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan relokasi kantor diplomatik AS ke Jerusalem, Resolusi MU terhadap AS, dan implikasinya bagi AS menurut Piagam PBB. Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Tindakan AS terhadap Jerusalem telah melanggar prinsip dan tujuan PBB khususnya dalam penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah atas Jerusalem serta melakukan pelanggaran terhadap perdamaian. Resolusi Nomor A/ES-10/L/22 secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat dan hanya bersifat rekomendasi, namun dalam praktik senantiasa ditaati dan efektif dalam penyelesaian konflik internasional karena mengandung bobot moral yang bersumber dari pendapat mayoritas anggota PBB. Penyalahgunaan veto di Dewan Keamanan yang mengakibatkan masuknya intervensi Majelis Umum tersebut menjadi suatu isu krusial dalam kerangka Piagam PBB meski pada prinsipnya tidak menghalangi peran Majelis Umum dalam menyelesaikan konflik internasional.

Kata Kunci : perdamaian dan keamanan internasional, resolusi majelis umum, Jerusalem, Piagam PBB

Legal Analysis Against The United Nations General Assembly Resolution Number A/ES-10/L/22 in The Case of The Relocation of The Diplomatic Representatives of United States from Tel Aviv to Jerusalem Based on The Charter of The United Nations

Prodigy Journal Vol. 6 No.1, July 2018, page 1 - 22

*In the maintenance of international peace and security, the UN General Assembly may intervene an international dispute when the Security Council fails to exercise its functions. These interventions appear to be very significant in some international dispute settlement. The General Assembly passed resolution A/ES-10/L/22 in the case of the initiation of the relocation of the US diplomatic office from Tel Aviv to Jerusalem. The status of Jerusalem according to the UN Resolution is “*corpus separatum*” which means to have special status under UN authorization. The issue to be studied is whether the relocation of diplomatic office to Jerusalem by the US can be justified and how the General Assembly resolutions against such US actions and the implications for the US under the UN Charter. This paper aims to examine the act of relocating US diplomatic office from Tel Aviv to Jerusalem, General Assembly Resolution to the US, and its implications for the US under the UN Charter. This paper uses normative juridical writing method. The US action against Jerusalem has violated the principles and objectives of the UN, especially in respect to the sovereignty and territorial integrity of Jerusalem and its violation of the peace. Resolution Number A/ES-10/L/22 by procedure and substance has been in accordance with the provisions of the UN Charter. Although the resolution is non-binding and is only a recommendation, but in practice relatively obeyed and effective in resolving international conflicts because it contains the moral weight of public opinion by the majority of the UN members. The abuse of veto on the Security Council which causing the General Assembly intervention has been becoming a crucial issue within the framework of the UN Charter although in principle it did not preclude the role of the General Assembly in resolving international conflicts.*

Keywords: *international peace and security, general assembly resolution, Jerusalem, United Nations Charter*

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

R.Priharta Budiprasetya E.P.Y

Badan Keahlian DPR RI

Urgensi Pengaturan Migrasi Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 23 - 44

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi di bidang penyiaran terutama terkait dengan perubahan sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital. Hal ini disebabkan memasuki abad 21 organisasi internasional yang mengatur penyiaran televisi dan radio di seluruh dunia yaitu *International Telecommunication Union* (ITU) telah menetapkan bahwa tidak akan ada lagi frekuensi analog yang digunakan untuk penyiaran di seluruh dunia. Hal ini memicu persoalan karena di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur digitalisasi penyiaran sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih mengatur terbatas pada penyiaran analog. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan mengetahui pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menguatkan urgensi pengaturan migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia dan mendapatkan pengaturan model migrasi digitalisasi penyiaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah migrasi digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah mendesak untuk dilakukan dan memerlukan kepastian hukum berupa pengaturan dalam undang-undang dan pilihan model pengelolaan migrasi analog ke digital harus berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang maksimal dapat diterima oleh masyarakat.

Kata kunci : migrasi, digitalisasi, penyiaran

The Urgency to Regulate Migration for Digitalization of Broadcasting in Indonesia

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 23- 44

The substance of Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting (Broadcasting Act) is no longer able to anticipate the development of technological progress in the field of broadcasting primarily related to the change of analogue broadcasting system into digital broadcasting system. This is due to the entering of the 21st century international organization that regulates radio and television broadcasting around the world that is International Telecommunication Union (ITU) has determined that there will be no more analogue frequency used for broadcasting around the world. This triggers the problem because in Indonesia there has been no regulation that regulates the digitalization of broadcasting because Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting still regulates, limited to, analog broadcasting. Based on the description there is a problem that is urgency of migration arrangement of digitalization of broadcasting in Indonesia and how the arrangement of broadcast digitalization migration model that can be applied in Indonesia. The purpose of this paper is to know the urgency of digitalization migration's arrangement in Indonesia and to know the regulation of broadcast digitalization migration model that can be applied in Indonesia. The discussion in this paper uses normative juridical approach method by studying substance and positive law which strengthen urgency of digitalization migration's arrangement in Indonesia and get arrangement of broadcast digitalization migration model that can be applied in Indonesia. The conclusion of this problem is that the migration of digitalisation of broadcasting in Indonesia is urgent to apply. It requires legal certainty in the form of regulation in the law and the choice of analog to digital migration management model that should be based on the consideration of maximum benefit of the community.

Keywords: migration, digitalization, broadcasting

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Maria Priscyla Stephanie Florencia Winoto

Badan Keahlian DPR RI

**Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 45- 69

Konstitusionalitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar hukum tata negara yang didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap dasar pengaturan hak angket, yaitu Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) beserta penjelasannya. Pihak yang setuju beranggapan bahwa hak angket merupakan bentuk pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, sementara pihak kontra beranggapan bahwa hak angket seharusnya ditujukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah saja. Polemik tidak mereda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Para Pemohon, dengan pendapat berbeda dari 4 (empat) orang hakim MK. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui praktik hak angket di Indonesia selama ini dan perbandingan praktik hak angket di beberapa parlemen negara lain, serta untuk mengetahui konstitusionalitas hak angket. Metode penulisan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam praktik hak angket di Indonesia, KPK bukan satu-satunya lembaga independen di luar eksekutif yang pernah diangket; Kedua, praktik di beberapa parlemen negara lain menunjukkan bahwa hak angket dapat dilakukan untuk pelaksanaan undang-undang dan ditujukan di luar eksekutif; dan Ketiga, hak angket terhadap KPK konstitusional berdasarkan hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan prosedur pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK (Pansus Hak Angket KPK). Penulis menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap rumusan Pasal 79 ayat (3) UU tentang MD3 dan penjelasannya, agar tidak lagi menimbulkan multitafsir.

Kata Kunci: konstitusionalitas, hak angket, KPK, DPR, UU tentang MD3

Constitutionality of The Right of Inquiry of The Indonesian House of Representatives Towards Corruption Eradication Commission

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 44- 69

Abstract

Constitutionality of the right of inquiry of The House of Representatives (DPR) to Corruption Eradication Commission (KPK) evoke the pros and cons between the experts of constitutional law, based on different interpretation towards Article 79 paragraph (3) Law Number 17 of 2014 concerning People Consultative Assembly Legislative Council, House of Representatives, and Regional House of Representatives (MD3 Act) and its explanation, as the legal basis of the right of inquiry. The pros side assume that the right of inquiry as the control of DPR to its legislative products, while the cons side contend the right of inquiry aims to investigate the government policy only. The polemic does not end after Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, and 40/PUU-XV/2017 which rejected the petition of applicants, with dissenting opinion from 4 (four) of constitutional judges. This paper aims to know the practice of the right of inquiry in Indonesia, the comparison of the right of inquiry on the foreign parliament and also to know the constitutionality of the right of inquiry. The writing method uses juridical analysis with descriptive analysis writing specification. This paper concludes that: First, KPK is not the only independence institution outside the government who become the subject of the right of inquiry; Second, the practice on the several foreign parliaments show that the object of the right of inquiry can be used on the implementation of the acts and can be targeted to the institution outside of the government; and Third, the right of inquiry to KPK is constitutional based on positive law, Constitutional Court verdict, legislative drafting technique, and the establishment procedure of Special Committee on the Right of Inquiry to KPK. The writer suggests for immediate revision of Article 79 paragraph (3) of MD3 Act and its explanation so it will not cause multiple interpretations.

Keywords: constitutionality, right of inquiry, KPK, DPR, MD3 Act

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Agus Priyono

Badan Keahlian DPR RI

Reformulasi Pengaturan Kewenangan Praperadilan dalam Memeriksa Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 70-86

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memiliki implikasi bertambahnya objek praperadilan salah satunya yakni pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Meskipun pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka telah masuk sebagai objek praperadilan namun masih terdapat persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang coba diangkat dalam tulisan ini yakni terkait prosedur dalam pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan, apakah hakim dapat memeriksa substansi pokok perkara atau hanya memeriksa dalam aspek formil. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana reformulasi pengaturan prosedur pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh praperadilan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP) yang akan datang. Penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggabungkan teori pengawasan horizontal dalam hukum acara pidana dan teori pembentukan undang-undang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa *pertama*, perluasan kewenangan praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak melanggar hak asasi tersangka. *Kedua*, bahwa reformulasi pengaturan kewenangan praperadilan dalam memeriksa sah atau tidak tersangka dititikberatkan pada pengaturan bahwa prosedur pemeriksaan penetapan tersangka tersebut perlu diatur dalam RUU tentang HAP secara jelas dan pasti. Kemudian, hakim dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka selayaknya hanya bersifat administratif dan tidak masuk kepada substansi pokok perkara, hal ini guna menghindari tumpang tindih dengan kewenangan hakim dalam acara pemeriksaan biasa.

Kata kunci: praperadilan, penetapan tersangka, dan putusan mahkamah konstitusi

Reformulation of Pretrial Authority Arrangements in Examination of The Validity of The Determination of The Suspect

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 70- 86

The issuance of Constitutional Court Decision (Verdict of the Constitutional Court) No. 21/PUU-XII/2014 dated April 28th, 2015 has the implication of increasing pre-trial object, one of which is the examination of the validity of the determination of the status of the suspect. Although the examination of the validity of the determination of the status of the suspect has been entered as the object of pretrial, however it still retains the legal issue. The problem in this paper is related to the procedure in the examination of the validity of the determination of the status of the suspect by the pretrial, whether the judge on the examination of the validity of the determination of the status of the suspect could check the substance of the principal matter or just check in the formal aspect. The purpose of this paper is to find out how to reformulate the regulation of the procedure for the examination of the validity of the determination of the status of the suspect by the pretrial in the future of the Bill of criminal procedure. The writer in analyzing the problem is using normative juridical research method by combining horizontal supervision theory in criminal procedure law and formation theory of law. This paper concludes that first, extension of pretrial authority through Decision of the Constitutional Court No. 21/PUU-XII/2014 that was related to the examination of the validity of the determination of the status of the suspect is based on the consideration that the determination of the suspect is one form of forced efforts that should be supervised to ensure that it does not violate the rights of the suspect. Second, the reformulation of pretrial authority arrangements in examination of the validity of the determination of the status of the suspect is emphasized on the arrangement that the suspect's determination procedure should be regulated in the Bill on Criminal Procedure (HAP) clearly and definitely. Then, the judge in examining the validity of the suspect should only be administrative and not subject to the substance of the case, in order to avoid overlapping with the authority of the judge in the ordinary examination.

Keywords: pretrial, determination of the suspect, and the verdict of the constitutional court

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Nita Ariyulinda

Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Konstitusi

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 87-103

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU tentang Tenaga Kesehatan) mengatur mengenai pembentukan hanya satu organisasi profesi yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (2). Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan mengandung makna bahwa setiap masing-masing kelompok tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Dalam pasal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pengaturan Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dapat mengurangi hak masing-masing kelompok tenaga kesehatan untuk berserikat dan berkumpul, mengingat adanya pembatasan untuk pembentukan organisasi profesi tenaga kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan pembentukan satu organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan dan bagaimanakah pengaturan Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan ditinjau dari perspektif konstitusi. Tujuan penulisan adalah mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam Pasal 50 ayat (2) UU tentang Tenaga Kesehatan terkait mengenai hanya satu organisasi profesi dan untuk mengetahui bagaimana Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan dalam perspektif konstitusi. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 UU tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang pembentukan hanya satu organisasi profesi. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi dari organisasi profesi, sehingga tidak mengurangi hak seseorang untuk berserikat dan berkumpul.

Kata kunci: konstitusi, tenaga kesehatan, organisasi profesi, berserikat dan berkumpul

Juridical Analysis Article 50 Law Number 36 Year 2014 on Health Personnel Required in Constitutional Perspective

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 87- 103

Law Number 36 Year 2014 on Health Personnel (Law on Health Workers) regulates the establishment of only one professional organization as stipulated in Article 50 paragraph (2). Article 50 paragraph (2) of the Law on Health Personnel means that each group of health workers can only form a professional organization. The article raises the question as to whether the regulation of Article 50 paragraph (2) of the Law on Health Personnel could reduce the right of each group of health workers to assemble, given the limitation for the formation of health professional organizations. As it is known that the right to association and assembly is one of the basic human rights guaranteed in Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution (1945 Constitution). This paper raises the issue of what the regulatory considerations can only form a professional organization as regulated in Article 50 paragraph (2) of the Law on Health Personnel and how the regulation of Article 50 of Law on Health Personnel from the perspective of the constitution. The purpose of writing is to know what matters to be considered in Article 50 paragraph (2) of the Law on Health Personnel concerned about only one professional organization and to find out how Article 50 of the Law on Health Personnel in the perspective of the constitution. This method of writing uses normative juridical method with the approach of legislation. Article 50 of the Law on Health Personnel regulates the establishment of only one professional organization, this is motivated by the roles and functions of professional organizations, but it does not diminish a person's right to union and assembly.

Keywords: constitution, health manpower, professional organization, union and assembly

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Meirina Fajarwati

Badan Keahlian DPR RI

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 104-128

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17 Tahun 2016) yang di dalamnya memuat sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun keberadaan kebiri kimia ini menemui berbagai penolakan salah satunya dari eksekutorial kebiri kimia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan bagaimana pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan pengaturan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 ditinjau dari asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: *Pertama*, kebiri kimia diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. *Kedua*, pengaturan kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 tidak mencerminkan asas dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan kesimpulan tersebut diperoleh suatu saran yaitu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak maka aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang maksimal bagi pelaku.

Kata Kunci: kebiri kimia, perlindungan anak, kekerasan seksual

Juridical Review of The Regulation of Chemical Castration in Law on Child Protection

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 104- 128

The number of cases of sexual violence that occurred against children over the last few years has prompted the government to issue Law Number 17 Year 2016 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children into Law (Law Number 17 Year 2016) which contains chemical castration punishment for perpetrators of child sexual abuse. Nevertheless, the implementation of chemical castration has encountered various rejections, one of them is chemical castration executor. Based on these matters, this paper will examine how the basic consideration of chemical castration regulation in Law Number 17 Year 2016 and how the regulation of Chemical Castration based on Law Number 17 Year 2016 reviewed from the principle of the enforcement of a law. The purpose of this paper are to know the basic consideration of chemical castration in Law Number 17 Year 2016 and the regulation of chemical castration based on the Law Number 17 Year 2016 reviewed from the principle of the enforcement of a law. The method used in this paper is juridical normative by using literature of law or secondary data. From the research result, it can be concluded that: First, chemical castration is expected to provide a deterrent effect and reduce the number of cases of sexual violence against children. Second, the regulation of chemical castration in the Law 17 Year 2016 does not reflect the principle to be implemented as stated in Article 5 Sub Article d of Law Number 12 Year 2011 on Law on the Establishment of Legislation (Law on the Establishment of Legislation). Based on those conclusions, it has obtained a suggestion that to reduce cases of sexual violence in children, the law enforcement officers must impose maximum sanctions for the perpetrators.

Keywords: chemical castration, child protection, sexual violence

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Maharani Siti Shopia

Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR RI

Dampak Pemberian Hak Imunitas Oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 129 - 149

Penerapan hak imunitas anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 2 Tahun 2018) kembali menimbulkan gejolak di masyarakat. Hak imunitas yang sejatinya merupakan hak mutlak yang melekat bagi anggota DPR yang jamak diberikan kepada anggota parlemen di dunia, seharusnya dilihat sebagai jalan untuk meningkatkan efektivitas kinerja DPR dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun demikian, kondisi kultural anggota DPR saat ini seolah perlu diberi batasan yang tegas dalam pemberian hak imunitas tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk membahas secara sederhana dampak penerapan hak imunitas anggota DPR yang diberikan baik oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun oleh UU No. 2 Tahun 2018 dengan menggunakan metode deskriptif normatif melalui pendekatan saintifik. Berdasarkan hal tersebut, pemberian hak imunitas anggota DPR lazim diberikan untuk mengoptimalkan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan tetap memperhatikan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR No. 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 sehingga meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Kata kunci: hak imunitas, DPR, UU No. 2 Tahun 2018

The Impact of Legal Immunity by Law Number 2 Year 2018 on The Improvement of The Performance of Member of The House of Representatives

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 129- 149

Implementation of Legal immunity for members of parliament in Law Number 2 Year 2018 concerning the second amendment to Law Number 17 Year 2014 concerning the people's consultative assembly, parliament, regional council and local legislature (Law Number 2 Year 2018) caused turmoil in the community again. The Legal immunity is the inherent absolute right for legislative members of the parliament to be assigned to MPs in the world, should be seen as a way to improve the effectiveness of the performance of the legislative council in terms of legislative functions, budgetary functions, and oversight functions. However, the current cultural conditions of representatives of the people's councils seem to be given strict limits on the granting of such legal immunity. This paper aims to discuss the impact of the implementation of the immunity rights of the legislative members of the people given either by the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 as well as by Law Number 2 Year 2018 by using normative descriptive method through scientific approach. Based on this, the granting of the legal immunity to the legislative assembly is commonly used to optimize its function and duties as a representative of the people so that it is expected to improve performance and keep the regulation of the People's Representative Council Number 1 Year 2014 as already amended several times with the latest by the People's Representative Council 2016 and regulation of the People's Representative Council Number 1 Year 2015 so as to minimize the occurrence of abuse of authority and power.

Keywords: immunity rights, House of Representatives, Law Number 2 Year 2018

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Wiwin Sri Rahyani

Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis Pemberian Insentif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 150 - 164

Sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak. Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan mengenai perbedaan pelaksanaan insentif dengan upah pungut serta fungsi dari insentif untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Pemberian insentif sebagai pendorong bagi aparat pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja dalam memungut pajak, dengan demikian pemberian insentif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemberian Insentif diharapkan mampu membuat aparat termotivasi sehingga dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab. Sehingga pemberian insentif pemungutan tidak hanya sebagai reward dan tambahan penghasilan kepada petugas pemungut, juga sebagai sarana bagi instansi pemungut pajak di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, insentif, instansi pemungut pajak

Juridical Analysis of Incentive Granting in Law Number 28 Year 2009 Regarding Regional Taxes and Regional Retributions

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 150- 164

As an autonomous region, the regions are given the authority to levy regional taxes and regional retributions. The management of regional taxes and regional retributions have been submitted to local government affairs as part of the fiscal decentralization policy, so that it should be managed and improved as one source of regional revenue. Implementation of tax collection and retribution is still faced with the issue of taxpayer consciousness is still relatively low so it requires the role and efforts of the apparatus of tax collectors. In line with the principles of good governance, particularly in exploring and managing all potential taxes and levies, local governments can provide incentives in addition to income for tax collection and retribution for the implementing agencies that achieve certain performance. Based on this background, there are problems regarding the different implementation of incentives with the collection wage and the function of the incentives for the implementing agencies of tax and retribution collectors based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Regional Retributions as well as the implementation regulations. Writing method used is the method of normative law. The specification of writing is descriptive analytical. Methods of data analysis conducted by qualitative juridical. Provision of incentives as a driver for tax collectors to improve performance in levying taxes, thus providing incentives is expected to be one of the efforts to increase tax revenue and regional retribution. Provision of Incentives is expected to make apparatus implementing tax collection and retribution motivated to work honestly, cleanly and responsibly. So that the provision of incentives of collecting not only as a reward or additional income that simply provide welfare in the form of material to the collector, but also as a means for tax collection agencies in the region in order to improve the quality of services to the community and of course also to increase local revenue.

Keywords: regional taxes, regional retributions, incentives, tax collection agencies

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Yanuar Putra Erwin

Badan Keahlian DPR RI

Pekerja Anak: Bagaimana Perlindungan Hukumnya?

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 165 - 183

SKedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonominya. Permasalahan tersebut menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah pekerja anak tersebut dilarang atau dilegalkan, dibiarkan atau dilindungi. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum pekerja anak dan implikasi hukum mempekerjakan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif. Anak pada umumnya tidak seharusnya bekerja atau dipekerjakan karena terdapat larangan mempekerjakan anak. Namun peraturan perundang-undangan memberikan keleluasaan terhadap anak dengan kondisi dan syarat tertentu bahwa anak diperbolehkan melakukan pekerjaan tertentu sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa anak dilarang dipekerjakan dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi, sebab hal tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi pidana kepada pemberi kerja yang bersangkutan.

Kata Kunci: pekerja anak, mempekerjakan anak, perlindungan hukum

Child Labour: How is The Legal Protection?

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 165 183

The position of a child in Indonesia is very vulnerable to the worse economic situation, many children are forced and being forced to work in helping to meet the needs of their economy. This issue is interesting and important to examine more in depth in accordance with applicable laws and regulations to find out whether the child labor is prohibited or legalized, allowed, or protected. This paper aims to find out the legal protection of child labour and the legal implications of employing children based on regulations. Writing method used is a qualitative method, namely the writing procedure descriptive-analytical data. Children are generally do not have to work or be employed because of the prohibition of child labor, but to certain terms and conditions in accordance with legislation are provided the flexibility of the children that the child is allowed to do certain jobs in accordance with the provisions of the legislation. In addition, this paper concludes that children are prohibited from being employed for the purpose of economic exploitation, since it may have implications for the imposition of criminal penalty on the employer concerned.

Keywords: child labor, employment of children, legal protection

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Arifudin

Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Analisis Yuridis Kedudukan Likuidator dalam Melikuidasi Perseroan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 184 - 200

Likuidator merupakan suatu profesi yang ditugaskan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU tentang Perseroan Terbatas) untuk melakukan likuidasi perseroan yang dibubarkan. Namun peranan penting tersebut tidak serta merta diiringi dengan pengaturan yang kompherensif tentang likuidator, sehingga kedudukan hukum likuidator menjadi absurd. Hal ini diantaranya disebabkan oleh tidak adanya definisi yang spesifik mengenai likuidator. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam bagaimana kedudukan likuidator dalam melikuidasi perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana kriteria dan pengaturan likuidator kedepan dalam suatu Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada penulisan ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kesimpulan dari penulisan ini adalah pengaturan mengenai kedudukan likuidator dalam UU tentang Perseroan Terbatas masih absurd. Oleh karena itu kedepannya, pengaturan likuidator setidaknya mengatur tentang pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian likuidator, pengawasan; hak dan kewajiban likuidator; honorarium; likuidator asing; kode etik dan dewan kehormatan likuidator; dan organisasi likuidator dalam Rancangan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas agar kedudukan likuidator kedepan memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Kata kunci: likuidator, likuidasi, perseroan terbatas

Juridical Analysis of The Role of Liquidator in Liquidating The Company According to Law Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 184 - 200

Liquidator is a profession assigned by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UU tentang Perseroan Terbatas) to liquidate the company which is dissolved. But, the important role of liquidator is not necessarily accompanied by a comprehensive regulation of the liquidator, so that the legal position of the liquidator becomes absurd. This is due to the absence of a specific definition of a liquidator. Therefore, it is necessary to conduct an in-depth study of how the liquidator position in the liquidation of the company according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and how the criteria and regulation of liquidator in the future of the Limited Liability Company Bill. This paper using normative juridical method by using statutory approach. The conclusion of this paper is the regulation of the position of the liquidator in the law of PT still absurd. Therefore, in the future, liquidator arrangements should at least govern the appointment, oath, status, action, and dismissal of the liquidator, supervision; rights and obligations of advocates; honorarium; foreign liquidator; code of ethics and the board of honor of the liquidator; and the liquidator organization in the Draft Law regulating the Limited Liability Company for future liquidator positions to have a clear legal standing.

Keywords: liquidator, liquidation, limited company

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2018

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Chairul Umam

Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Telaah Kritis Terhadap Penjaminan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan Persinggungannya Dengan Sektor Usaha Perasuransian

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 1, Juli 2018, halaman 201- 216

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU tentang Penjaminan) telah diundangkan tahun 2016 lalu. Namun demikian secara normatif, Undang-Undang tentang Penjaminan masih menyimpan persoalan terutama keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU tentang Perasuransian) dan praktiknya yang sudah berjalan sebelum adanya UU tentang Penjaminan. Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini mengenai bagaimana penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang Penjaminan serta apa permasalahan dan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Tujuan penulisan untuk mengetahui penjaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang Penjaminan serta permasalahan dan persinggungannya dengan UU tentang Perasuransian. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis perundang-undangan di bidang penjaminan dan di bidang perasuransian serta berbagai referensi terkait lainnya. Berdasarkan analisis dalam kajian ini disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan revisi terbatas terhadap norma pasal dalam UU tentang Perasuransian yang akan berdampak pada sektor usaha penjaminan dan usaha jasa keperantaraan/pialang dan usaha reasuransi yang masih melakukan usaha di sektor penjaminan harus melepaskan usahanya untuk menghindari tumpang tindih dan demi terwujudnya kepastian hukum di sektor usaha penjaminan.

Kata Kunci: penjaminan, perasuransian, sektor usaha

Critical Analysis toward Guarantee in Law Number 1 Year 2016 on Guarantee and Its Intersection with Insurance Business Sectors

Prodigy Journal Vol. 6 No. 1, July 2018, page 201- 216

*L*The Law Number 1 Year 2016 on Guarantee has been enacted in 2016. However, normatively the Guarantee Law still retains some issues, especially related to the Law Number 40 Year 2014 on Insurance and its practice which has been running before the Guarantee Law. The issues will be explored in this writing concerning how the guarantee arrangement in the Civil Code Law and in the Guarantee Law and its matter and allusion to the Insurance Law. The purpose of this writing is to know the guarantee arrangements in the Civil Code Law and in the Guarantee Law and its matter and allusion to the Insurance Law. The writing method used in this paper is a normative juridical approach that examines and analyzes the legislation in the field of guarantee and in the field of insurance as well as other relevant references. Based on the analysis in this paper, it can be concluded that necessary to take limited revision to some articles in the Insurance Law which impact the guarantee sector and for the brokers and reinsurance businesses who they are still doing business in the guaranteed sector have to release their businesses to avoid overlapping and to create legal certainty in the guarantee business sector.

Keywords: guarantee, insurance, business sector